

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

K-pop tidak lagi dipandang semata sebagai fenomena hiburan, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan budaya global yang memainkan peran penting dalam membentuk wacana sosial, politik, dan ekonomi. Di era digital, budaya populer Korea ini melampaui fungsi komersial dan menjadi medium ekspresi yang berpengaruh di ruang publik. Sebagai bagian dari gelombang Hallyu, K-pop memperlihatkan bagaimana produksi budaya dapat membentuk opini publik, membangun identitas kolektif, dan menjadi alat artikulasi politik.

Pertumbuhan ekonomi industri *K-pop* menjadi indikator penting kekuatan budaya ini. Berdasarkan laporan *Korea Culture and Tourism Institute* (2024), nilai ekspor *K-pop* pada tahun 2023 mencapai lebih dari 1 triliun won, meningkat 34,3% dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini memperlihatkan posisi strategis budaya populer tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam hubungan kuasa antara negara, industri hiburan, dan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, *K-pop* tidak sepenuhnya bebas dari intervensi negara. Kebijakan pemerintahan Yoon Suk-yeol, misalnya, banyak dikritik karena dianggap membatasi ruang berekspresi di ruang digital melalui pengawasan dan regulasi konten daring yang bersifat politis. Meskipun kebijakan tersebut tidak

secara langsung menyasar industri *K-pop*, dampaknya terasa pada komunitas fandom yang aktif di media sosial. Ruang partisipasi mereka sebagai warga digital menjadi terbatas oleh regulasi yang didesain atas nama stabilitas nasional.

Komunitas fandom *K-pop*, yang semula dikenal sebagai konsumen budaya, kini bertransformasi menjadi aktor politik digital. Melalui platform seperti Twitter, mereka membangun narasi kolektif, menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta mengorganisasi aksi digital berupa kampanye tagar, petisi daring, dan meme sebagai bentuk perlawanan simbolik.

Untuk membaca dinamika ini, penelitian ini menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) seperti yang dirumuskan Fairclough (1995), yang memandang bahasa sebagai medium ideologis dalam membentuk dan menantang struktur kuasa. Komunitas fandom *K-pop*, dalam hal ini, menjadi bagian dari resistensi diskursif terhadap dominasi negara di ruang digital. Sebagaimana dikatakan Jenkins (2006), demokrasi digital membuka peluang bagi publik untuk memanfaatkan media sosial sebagai arena resistensi sebuah kondisi yang relevan dengan bagaimana komunitas *fandom K-pop* memproduksi wacana kritik terhadap pemerintah.

Resistensi fandom tidak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga dalam ruang simbolik. Atribut fandom seperti lightstick dan poster idol digunakan dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk kritik budaya terhadap negara. Namun, partisipasi semacam ini berisiko mendapat represi berupa pembatasan ruang gerak, sensor, bahkan boikot terhadap artis atau penggemar yang bersuara kritis.

Dengan demikian, resistensi komunitas fandom *K-pop* terhadap pembatasan ekspresi menjadi bagian dari pertarungan hegemoni dan kontra-hegemoni di ruang komunikasi politik kontemporer Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunitas fandom *K-pop* memproduksi praktik diskursif resistensi di media sosial *Twitter* dalam menghadapi kebijakan pembatasan ekspresi yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji fenomena resistensi komunitas fandom *K-pop* di ruang digital terhadap kebijakan politik di Korea Selatan. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah:

1.2.1 Dampak Kebijakan Politik terhadap Industri K-pop

Kebijakan pengawasan dan pembatasan konten digital di era pemerintahan Yoon Suk-yeol menimbulkan pengaruh terhadap ekosistem industri *K-pop*, termasuk dalam hal strategi promosi, aktivitas artis, dan hubungan lintas negara.

1.2.2 Partisipasi Politik Komunitas K-pop di Media Sosial

Komunitas fandom *K-pop* aktif menggunakan media sosial, khususnya *Twitter*, sebagai ruang partisipasi politik. Mereka mengekspresikan kritik, membangun solidaritas, dan menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah melalui kampanye digital.

1.2.3 Respons Industri K-pop terhadap Tekanan Politik

Di tengah tekanan kebijakan negara, agensi hiburan dan pelaku industri K-

pop harus menegosiasikan posisi mereka agar tetap relevan di pasar global, sambil mempertimbangkan risiko komersial dan tekanan politik domestik.

1.2.4 Persepsi Publik terhadap Keterlibatan Fandom K-pop dalam Politik

Keterlibatan fandom dalam aksi politik memunculkan respons beragam di masyarakat. Ada yang melihatnya sebagai bentuk keberdayaan generasi muda, namun ada pula yang menganggapnya tidak relevan. Fenomena ini memerlukan kajian kritis untuk memahami dampaknya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan utama penelitian ini:

“Bagaimana kebijakan politik di Korea Selatan memengaruhi partisipasi politik komunitas fandom K-pop dalam menyuarakan resistensi melalui media sosial Twitter?”

Rumusan masalah tersebut menjadi pijakan utama dalam penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara kebijakan politik negara dan dinamika partisipasi komunitas budaya populer dalam ruang *digital*. Dengan memfokuskan pertanyaan pada respons komunitas *fandom K-pop* terhadap kebijakan pemerintah Korea Selatan melalui *platform Twitter*, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana kekuasaan, ideologi, dan praktek komunikasi politik saling berkelindan dalam konstruksi wacana publik kontemporer.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak kebijakan politik Korea Selatan terhadap ruang ekspresi komunitas fandom *K-pop*.
2. Mengkaji bagaimana komunitas fandom *K-pop* membentuk praktik diskursif resistensi di media sosial, khususnya *Twitter*.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik komunitas fandom *K-pop* di ruang digital.
4. Menjelaskan bagaimana media sosial digunakan sebagai arena perlawanan simbolik terhadap kekuasaan negara.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah akademis maupun praktis, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan politik, budaya populer, dan dinamika masyarakat *digital* kontemporer.

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik dan budaya populer, terutama dalam memahami peran komunitas fandom sebagai aktor politik di era digital. Temuan penelitian ini juga memperkaya wacana tentang media sosial sebagai ruang pembentukan opini publik dan ekspresi ideologis.

1.5.2 Manfaat Sosial dan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi industri hiburan, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam memahami dinamika hubungan antara negara, budaya populer, dan masyarakat digital. Temuan ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih demokratis dan responsif terhadap partisipasi warga di ruang publik, khususnya dari komunitas budaya populer.